PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KELAS 1A KHUSUS

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12550
telp. 021-7805908 / 7805909
fax. 021-7805906
email : informasi@pn-jakartaselatan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan. Tidak pula kami sampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Koordinator Wilayah yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku unit kerjanya. Demikian juga dengan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini adalah merupakan wadah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2019, yang tidak lain merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan yang baik *(good governance).* Laporan tahunan ini merupakan paparan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 (*cut off*), adapun pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak luput dari Sumber Daya Manusia, Dana, Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini kami sajikan, untuk dijadikan acuan pada tahun mendatang, akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Drs.Arifin.,S.H.,M.Hum
NIP. 196005031988041001

Profil

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membawahi wilayah hukum Jakarta Selatan yang terdiri dari :

1. Kebayoran Baru
2. Kebayoran Lama
3. Pesanggrahan
4. Cilandak
5. Pasar Minggu
6. Jagakarsa
7. Mampang Prapatan
8. Pancoran
9. Tebet
10. Setiabudi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Kelas 1A Khusus

Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Tlp.021-7805909. Fax: 021-7805906
Email: informasi@pn-jakartaselatan.go.id **dan** pnjaksel133@gmail.com
Delegasi: delegasipnjs@yahoo.com

4 PILAR
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

PANITERA

BERKIBAR

		HAL
PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		4
BAB I	PENDAHULUAN	6
BAB II	A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	18
	1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	18
	2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	19
	3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	19
	4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	20
	B. Penyelesaian Perkara	20
	1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	20
	2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	24
	3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,kasasi dan PK	25
	4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi	27
	5. Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi	27
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertipikat ISO Pengadilan)	30
	1. Posbakum	31
	2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	32
	3. Perkara Prodeo(pembebasan Biaya Perkara)	33
BAB III	Sumber Daya Manusia	38
	Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan /Golongan /Pendidikan	40
	1. Mutasi	46
	2. Promosi	46
	3. Pensiun	47
	4. Diklat	47
BAB IV	Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	49

	A. Pengelolaan Keuangan	49
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	55
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	59
	1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	59
	2, Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	61
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	64
	1. Akreditasi Penjaminan Mutu	67
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67
	3. Inovasi Pelayanan Publik	69
BAB VI	PENGAWASAN	72
	1. Internal	72
	2. Evaluasi	76
BAB VII	PENUTUP	77
	1. Kesimpulan	77
	2. Saran	78

BAB I

PENDAHULUAN

HIGHLIGHT PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TAHUN 2019

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini adalah merupakan paparan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas unit kerja yang berada di bawah lembaga organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas tersebut senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kebijakan Umum Peradilan

Mahkamah Agung RI selaku puncak pimpinan Lembaga Peradilan telah menetapkan Visi dan Misi yang akan dicapai di masa mendatang yaitu:

"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung".

Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung tersebut,Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman,mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarayang diterimanya, untukitudiperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi danlebihterarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.Olehkarenaitu penetapan kebijakan umum ini dimaksudkan sebagai jawaban atas penilaian yang berkembang tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk didalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang-bidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomanioleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat yang memerlukan pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal,

benar dan transparan salah satunya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Memprioritaskan penyelesaian perkara-perkara yang dimohonkan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
3. Telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Monitoring Aplikasi Perkara untuk Membantu proses penyelesaian perkara secara cepat, benar dan didasari kepada kepedulian dan kesadaran yang tinggi serta penuh tanggung jawab.
4. Telah menerapkan Aplikasi E Court untuk mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Penataan lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG AGUNG"

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Rencana Strategis

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu unsure pokok untuk terwujudnya system akuntabilitas, dalam pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus mengoptimalkan program kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baiklingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus terus

disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra yang ada diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hokum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Struktur Organisasi (TUPOKSI)

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua

Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dilihat dalam bagan berikut:

- **KEDUDUKAN**

  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- **TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus/, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

- **FUNGSI**

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,

Jurusita/Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perlengkapan)(*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
f. Fungsi Iainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

- **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan

mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.

- **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membawahi:
- **Majelis Hakim** mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara / Kepaniteraan (Perdata, Pidana dan Hukum) dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum).
- **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti. Panitera membawahi :

- **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi, menyiapkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung.
- **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Pidana.
- **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara (Perdata dan Pidana), dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengolah dan
- mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

➢ **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan beserta bagian Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum yang membawahi:

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dan Panitera/Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Bagian Umum membawahi:

- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezzeting pegawai, mengupload SIMPEG, mencatat absensi pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.

- **Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (kecuali keuangan perkara) serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan Pengelolaan Teknologi Informasi beserta pelaporan.

➢ **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan

- atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.
- **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.
- **Juru Sita Pengganti** mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam wilayah hukum Jakarta Selatan maupun bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lainnya, menjalankan pemberitahuan isi putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

BAB II
KEADAAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, perlu dilakukan suatu penilaian sampai sejauh mana capaian penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berhasil menyelesaikan ***1.478*** perkara pidana dari ***1.466*** perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara tahun 2018 sejumlah ***376*** perkara sehingga keseluruhan berjumlah ***1.842*** perkara pidana dan dalam prosentase penyelesaianannya mencapai (***80.23 %*** **).** Sedangkan untuk Perkara Perdata Gugatan, telah berhasil menyelesaikan **1.094** Perkara dari **1.098** perkara perdata yang merupakan ***747*** sisa tahun 2018 dan ***1.845*** perkara total yang masuk tahun 2019 sehingga penyelesaiannya mencapai (**59.29 %).** Sedangkan untuk Perkara Perdata Permohonan, telah berhasil menyelesaikan **1.285** Perkara dari **1.308** perkara perdata yang merupakan ***49*** sisa tahun 2018 dan ***1.357*** perkara total yang masuk tahun 2019 sehingga penyelesaiannya mencapai (**94.69 %).**

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Laporan Keadaan Perkara Tingkat banding adalah merupakan laporan perkara yang dimohonkan banding, dan dilaporkan sejak perkara diputus, diajukannya permohonan banding *s/d* pengirim berkas ke Pengadilan Tinggi Jakarta

Keadaan Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	PERKARA	PUTUS PN	BANDING	TIDAK BANDING	TURUN PT
1	PIDANA	1.477	120	1.357	111
2	PERDATA	1.094	257	837	219

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Jika pihak beperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan **KASASI** ke **Mahkamah Agung RI** melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya.

Keadaan Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO	PERKARA	TURUN PT	KASASI	TIDAK KASASI
1	PIDANA	**111**	**82**	**38**
2	PERDATA	**219**	**14**	**72**

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada pihak yang berperkara.

b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta

tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

d. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruari yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Keadaan Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK

NO	PERKARA	TURUN MA	PK	KIRIM MA
1	PIDANA	33	11	29
2	PERDATA	144	60	84

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2019

a. Matrik Perkara Perdata Gugatan 2019

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	**Januari**	**747**	119	71	795
2	**Februari**	795	91	77	809
3	**Maret**	809	96	78	827
4	**April**	827	91	64	854
5	**Mei**	854	83	134	803

6	**Juni**	803	52	46	809
7	**Juli**	809	94	115	788
8	**Agustus**	788	101	122	767
9	**September**	767	104	88	783
10	**Oktober**	783	111	132	762
11	**Nopember**	762	87	75	**774**
12	**Desember**	774	69	92	751
	JUMLAH		**1.098**	**1.094**	

Keterangan :
PERKARA PERDATA GUGATAN :
Sisa tahun 2018 : 747 Perkara ;
Terima / Masuk Tahun 2019 : 1.098 Perkara ;
Putus sampai dengan Desember 2019 : 1.094 Perkara ;
Sisa Belum Putus 2019 : 751 Perkara ;

b. Matrik Sisa Perkara Perdata Gugatan Tahun 2018 Yang diputus Tahun 2019

No.	PERKARA	SISA TAHUN LALU (Perkara)	PUTUS (Perkara)	SISA (Perkara)
1	**Perdata**	**747**	**730**	**17**

Keterangan :
- Sisa Perkara Perdata Gugatan Tahun 2018 Yang diputus Tahun 2019 : **17** Perkara

c. Matrik Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2019

NO.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	**JANUARI**	**0**	3	0	3
2	**FEBRUARI**	3	0	2	1

3	**MARET**	1	0	0	1
4	**APRIL**	1	0	0	1
5	**MEI**	1	2	0	3
6	**JUNI**	3	0	1	2
7	**JULI**	2	1	3	0
8	**AGUSTUS**	0	3	0	3
9	**SEPTEMBER**	3	3	3	3
10	**OKTOBER**	3	2	4	1
11	**NOPEMBER**	1	4	1	4
12	**DESEMBER**	4	1	0	**5**
	JUMLAH		**19**	**14**	

Keterangan :
Perkara Gugatan Sederhana

Sisa tahun 2018	:	0 Perkara ;
Terima / Masuk Tahun 2019	:	19 Perkara ;
Putus sampai dengan Desember 2019	:	14 Perkara ;
Sisa Belum Putus 2019	:	5 Perkara ;

d. Matrik Perkara Perdata Permohonan Tahun 2019

NO.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	**JANUARI**	**49**	190	120	119
2	**FEBRUARI**	119	117	121	115
3	**MARET**	115	115	127	103
4	**APRIL**	103	91	109	85
5	**MEI**	85	80	94	71
6	**JUNI**	71	60	42	89

7	**JULI**	89	143	125	107
8	**AGUSTUS**	107	105	123	89
9	**SEPTEMBER**	89	103	109	83
10	**OKTOBER**	83	132	126	89
11	**NOPEMBER**	89	107	110	86
12	**DESEMBER**	86	65	79	72
	JUMLAH		**1.308**	**1.285**	

Keterangan :
PERKARA PERMOHONAN
Sisa tahun 2018 : 49 Perkara ;
Terima / Masuk Tahun 2019 : 1.308 Perkara ;
Putus sampai dengan Desember 2019 : 1.285 Perkara ;
Sisa Belum Putus 2019 : 72 Perkara ;

e. Matrik Jumlah Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2018 Yang diputus Tahun 2019

No.	SISA TAHUN LALU (Perkara)	PUTUS (Perkara)	SISA (Perkara)
1	**49**	**47**	**2**

Keterangan :
- Jumlah Sisa Perkara Perdata Permohonan Tahun 2018 Yang diputus Tahun 2019 : **2** Perkara

f. Matrik Perkara Pidana Biasa Tahun 2019

NO.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	Januari	**376**	136	143	369
2	Februari	369	94	132	331

3	Maret	331	113	113	331
4	April	331	134	133	332
5	Mei	332	120	144	308
6	Juni	308	88	61	335
7	Juli	335	143	142	336
8	Agustus	336	112	113	335
9	September	335	135	130	340
10	Oktober	340	134	131	343
11	November	343	119	122	340
12	Desember	340	138	114	**364**
	JUMLAH		**1.466**	**1.478**	

KETERANGAN :
PERKARA PIDANA BIASA :
Sisa tahun 2018 : 376 PERKARA ;
Terima / Masuk Tahun 2019 : 1.466 PERKARA ;
Putus sampai dengan Desember 2019 : 1.478 PERKARA ;
Sisa Tahun 2019 : 364 PERKARA

g. Matrik Jumlah sisa Perkara Tahun 2018 Yang diputus Tahun 2019

No.	PERKARA	SISA TAHUN LALU (Perkara)	PUTUS	SISA
1	**Pidana Biasa**	**376**	**376**	**0**

Keterangan :
- Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 yang diputus Tahun 2019 : 0 perkara

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

a. Matrik Jumlah Perkara Perdata yang diputus tepat waktu < 5 BULAN (SEMA NO. 2 TAHUN 2014)

No.	PERKARA	MASUK TAHUN 2019	PUTUS TAHUN 2019	PUTUS (< 5 Bulan)	SISA (> 5 Bulan)
1	Perdata Gugatan	1.098	1.094	129	965
2	Perdata Permohonan	1.308	1.285	1.280	5

b. Matrik Jumlah Perkara Pidana yang diputus tepat waktu < 5 BULAN (SEMA NO. 2 TAHUN 2014)

No.	PERKARA	MASUK	PUTUS TAHUN 2019	PUTUS (< 5 Bulan)	SISA (> 5 Bulan)
1	Pidana Biasa	1.466	1.478	1.051	415

Keterangan :

- Perkara Pidana yang diputus tepat waktu < 5 = 1.051 Perkara

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PERKARA, BANDING,KASASI DAN PK

a. Matrik Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	PERKARA	PUTUS PN	BANDING	TIDAK BANDING
1	Perdata Gugatan	1.094	257	837

Keterangan :

- Perkara Perdata Gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2019 berjumlah : 837 Perkara

b. Matrik Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	PERKARA	TURUN PT	KASASI	TIDAK KASASI
1	**Perdata Gugatan**	**219**	**147**	**72**

Keterangan :

- Perkara Perdata Gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2019 berjumlah : 72 Perkara

c. Matrik Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No.	PERKARA	TURUN MA	PK	TIDAK PK
1	**Perdata Gugatan**	144	60	84

Keterangan :

- Perkara Perdata Gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2019 berjumlah : 84 Perkara

d. Matrik Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	PERKARA	PUTUS PN	BANDING	TIDAK BANDING	TURUN PT
1	**Pidana Biasa**	**1.478**	**120**	**1.357**	**111**

Keterangan :

- Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : 1.357 Perkara

e. Matrik Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	PERKARA	TURUN PT	KASASI	TIDAK KASASI
1	**Pidana Biasa**	111	82	38

Keterangan :

- Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi : 38 Perkara

f. Matrik Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No.	PERKARA	TURUN MA	PK	TIDAK PK
1	**Pidana Biasa**	33	11	29

Keterangan :

- Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali : 29 perkara

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Matrik Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi Tahun 2019

No.	PERKARA	MEDIASI	BERHASIL	GAGAL
1	**Perdata Gugatan**	762	39	631

Keterangan :

- Perkara Perdata Gugatan yang Masuk Mediasi Tahun 2019 berjumlah
- Berhasil Mediasi : 39 Perkara
- Gagal Mediasi : 631 Perkara

5. JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

- **Matrik Jumlah Perkara Pidana Anak Yang berhasil melalui Diversi Tahun 2019**

No.	PERKARA	MASUK	DIVERSI	GAGAL
1	**Pidana Anak**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

- Perkara Pidana Anak Yang berhasil melalui Diversi Tahun 2019 berjumlah : 0 Perkara

- **Matrik Perkara Penanganan Pidana Anak Tahun 2019**

NO.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA
1	Januari	**1**	4	1	4
2	Februari	4	0	3	1
3	Maret	1	5	3	3
4	April	3	2	3	2
5	Mei	2	4	3	3
6	Juni	3	0	1	2
7	Juli	2	1	1	2
8	Agustus	2	1	2	1
9	September	1	7	3	5
10	Oktober	5	3	7	1
11	November	1	3	0	4
12	Desember	4	0	3	1
	JUMLAH		**30**	**30**	

Sisa Tahun 2018 : 1 Perkara
Masuk Tahun 2019 : 30 Perkara
Putus tahun 2019 : 30 Perkara
Sisa Tahun 2019 : 1 Perkara

- **Matrik Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :**

No.	PERKARA	PUTUS PN	BANDING	TIDAK BANDING	TURUN PT
1	Pidana Anak	30	3	27	3

No.	PERKARA	TURUN PT	KASASI	TIDAK KASASI
1	Pidana Anak	3	2	1

No.	PERKARA	TURUN MA	PK	TIDAK PK
1	Pidana Anak	-	-	-

Matrik Jumlah Perkara Pidana anak yang diputus tepat waktu < 5 BULAN (SEMA NO. 2 TAHUN 2014)

No.	PERKARA	SISA TAHUN 2018	MASUK TAHUN 2019	PUTUS TAHUN 2019	PUTUS (< 5 Bulan)	SISA (> 5 Bulan)
1	Pidana anak	1	30	30	30	0

Matrik Perkara Pidana Tilang Tahun 2019

NO.	BULAN	Sisa Tahun 2018	BERKAS MASUK	BERKAS PUTUS	Sisa
1	Januari	-	19.052	19.052	-
2	Februari	-	23.954	23.954	-
3	Maret	-	27.667	27.667	-
4	April	-	10.060	10.060	-
5	Mei	-	9.681	9.681	-
6	Juni	-	9.537	9.537	-

7	Juli	-	25.955	25.955	-
8	Agustus	-	31.215	31.215	-
9	September	-	29.949	29.949	-
10	Oktober	-	8.403	8.403	-
11	Nopember	-	25.343	25.343	-
12	Desember	-	4.621	4.621	-
TOTAL			**225.437**	**225.437**	

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO9001:2008)

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639 /DJU /SK /OT 01.1/9/2015 untuk melalukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO9001:2008 ,diperkaya dengan penerapan International Frame work for Cour Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas Dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014 maka pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Memperoleh Penghargaan Sertifikat ISO 9001:2008 pada Tanggal 16 Desember 2015 dan Sebuah sertifikat manajemen mutu bagi pengadilan adalah suatu penilaian yang menjadikan tolok ukur kinerja sebuah pengadilan dengan Nomor : TAPM.064/QMR/Sertifikat/12/2016 dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI .

Sertifikat ISO dan Akreditasi

Kegiatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menuju WBK dan WBBM Zona Integritas Tahun 2019

- Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Satker Posbakum yaitu :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor, Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan, Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahny, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut Posbakum yang bekerjasama dengan PN Jakarta Selatan:

1. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jakarta Selatan
2. Lembaga Bantuan Hukum (PBH) Universitas Nasional
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UPN “Veteran” Jakarta
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia
5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bhayangkara

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.07.051

Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Anggaran dengan mata anggaran 1049.005 untuk Posbakum sebesar Rp. 72.000.000 yang diperuntukan untuk Pengacara Piket.

- SIDANG KELILING

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019 tidak ada program sidang keliling.

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tahun 2019 berjumlah 0) perkara saja.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 03 Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum tidak mendapat Pagu yang diperuntukan untuk pembebasan biaya perkara dan untuk tahun 2019.

KEPANITERAAN HUKUM

PENCATATAN PENGESAHAN AKTA KELAHIRAN 2019:

Akta Notaris Tahun 2019

No	Akta Notaris	Jumlah	PNBP
1	Perseroan Komanditer	48	48 X Rp.10.000 = Rp.480.000
2	Dan lain-lain	212	212 X Rp.10.000 = Rp.2.120.000
3	Perjanjian Kawin	105	105 X RP. 10.000 = Rp.1.050.000
4	Perusahaan Dagang	4	4 X Rp. 10.000 = Rp. 40.000
5	Yayasan	-	-
6	Notulen	34	34 X Rp. 10.000 = Rp.340.000
7	Perseoan Terbatas	-	-

LEGALISASI DAN PENGESAHAN SURAT DI BAWAH TANGAN

No	Jenis Surat	Jumlah	PNBP (X Rp.10.000)
1	Waarmeking	24	Rp. 240.000
2	Penghapusan Piutang Tak tertagih	34	Rp. 340.000
3	Surat Pernyataan Waris	243	Rp. 2.430.000
4	Penolakan Waris	8	Rp. 80.000
5	Surat Kuasa Perdata	4.635	Rp.46.350.000
6	Surat Kuasa Pidana	1.329	Rp.10.329.000

Matrik Jumlah Pengaduan

No	Bulan	Pengaduan Masuk	Pengaduan Telah Ditelaah/Diproses	Pengaduan Belum Ditelaah/Belum Diproses
1	Januari	3	-	3
2	Februari	3	3	
3	Maret	2	2	
4	April	1	1	
5	Mei	3	3	
6	Juni	2	2	
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	2	1	1
9	September	1	1	-
10	Oktober	6	2	4
11	November	1	1	-
12	Desember	-	-	-
J u m l a h		25	17	8

KEUANGAN PERKARA PERDATA (KASIR DAN PEMEGANG BUKU KAS)

Pemegang Buku Kas sebagai staf panitera muda perdata yang mendapat tugas delegasi dari Panitera Sekretaris untuk mencatat tentang penerimaan dan pengeluaran uang biaya perkara, adalah :

- Membuat buku kas bantu harian tentang uang perkara kontan (yang ada di brankas) dan yang keluar ditutup setiap hari serta dilaporkan dan diketahui oleh Panitera Sekretaris.
- Mengisi buku Induk Keuangan Perkara Perdata ditutup setiap bulan yang

ditandatangani oleh Panitera Sekretaris dan diketahui Ketua.

- Mengisi buku Keuangan Eksekusi ditutup setiap bulan yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris dan diketahui Ketua.
- Mengisi buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan ditutup setiap bulan yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris dan diketahui Ketua.
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata gugatan dan permohonan ditutup pada waktu perkara selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas .
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Banding ditutup pada waktu perkara selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas .
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Kasasi ditutup pada waktu perkara selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas .
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata PK ditutup pada waktu perkara selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas .
- Mengisi buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata Eksekusi ditutup pada waktu perkara selesai / putus yang ditandatangani oleh pemegang buku Kas .

Dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat yang ingin menyetorkan biaya perkara, maka sejak bulan Juli 2008 telah dibuka Bank Tabungan Negara kantor cabang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dapat memudahkan masyarakat yang ingin menyetorkan biaya.

Adapun Laporan Keuangan perkara perdata sampai dengan Desember 2019 dapat kami sajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**KEUANGAN PERKARA PERDATA**	
	(PERMOHONAN, GUGATAN, BANDING, KASASI DAN PK)	
	Saldo Kas	Rp.19.222.700,00
	Uang di Bank	Rp.2.830.799.758,00
	Total Saldo Kas dan Uang di Bank	**Rp. 2.850.022.458,00**
II	**KEUANGAN EKSEKUSI**	
	Saldo Kas	Rp. 24.508.000,00
	Uang di Bank	Rp. 1.290.220.443,00
	Total Saldo Kas dan Uang di Bank	**Rp. 1.314.728.443,00**
III	**KEUANGAN PNBP BULAN JANUARI S.D DESEMBER BAGIAN PERDATA DAN HUKUM**	
	(Disetor ke Bendahara Penerima setiap hari)	**Rp.237.757.000,00**
IV	**KEUANGAN PIHAK KETIGA**	
	Konsinyasi	**Rp.328.498.077.998,00**
	Lelang	**Rp. 7.290.380.047,56**
	Jaminan Penahanan	**Rp. 1.086.837.212,00**
	Pelaksanaan Putusan	Rp.55.173.081.289,32

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Aturan dan Pembinaan Perilaku Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung, sedangkan Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan.Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan yang berada dibarisan paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat lainnya, sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. *(Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)*

Kualitas dan kemampuan SDM di lingkungan MahkamahAgung RI dan Pengadilan di bawahnya harus dikembangkan melalui program-program yang komprehensif dan terintegrasi, baik tingkat kemampuan rofessional (mencakup teknis dan manajerial/kepemimpinan). Maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas SDM harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa,

bertanggungjawab dan berintegritas. Oleh karena itu PengadilanNegeri Jakarta Selatan melakukan langkah-langkah Pembenahan Manajemen SDM sesuai dengan yang telah tercantum dalam Panduan Umum Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara.

(STATISTIK SDM)

Sumber daya manusia yaitu salah satu faktor yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun **perusahaan.SDM** juga merupakan penentu perkembangan **perusahaan**. Pada hakikatnya, **SDM** berupa manusia yang dipekerjakan **dalam** sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuannya.Pada saat ini kekuatan personil pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjumlah **122 Orang ditambah Honorer 50 Orang** yang diklasifikasi sebagai berikut :

Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan /Golongan / Pendikan

	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	PENDIDIKAN
1	Drs. ARIFIN, SH, M.Hum 196005031988041001	Hakim Utama Muda IV/d	S2
2	Dr. JONI, S.H., M.H. 196406161986031005 040051542	Hakim Utama Muda IV/d	S3
3	H. KARTIM HAERUDDIN, SH.MH 195801191986121001 040051990	Hakim Utama Muda IV/d	S2
4	DJOKO INDIARTO, SH. MH. 195901071988031001 040053923	Hakim Utama Muda IV/d	S2
5	H. ZULKIFLI, SH., MH. 196004211980031001 040035096	Hakim Utama Muda IV/d	S2
6	FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH., MH. 196008071988032002	Hakim Utama Muda IV/d	S2
7	AKHMAD JAINI, SH.MH 196011181982031004 040040190	Hakim Utama Muda IV/d	S2
8	ACHMAD GUNTUR, SH. 196111051988031002	Hakim Utama Muda IV/d	S1
9	KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H. 196111071988031003 040016227	Hakim Utama Muda IV/d	S2
10	H. RATMOHO,SH 196205081989031001 220001188	Hakim Utama Muda IV/d	S2
11	LENNY WATI MULASIMADHI, SH.,MH 196310181988032003 040053788	Hakim Utama Muda IV/d	S2
12	IRWAN, SH. MH 196312071988031003 040053798	Hakim Utama Muda IV/d	S2
13	NAZAR EFFRIANDI,SH 196504051992121001	Hakim Utama Muda IV/d	S1
14	HARUNO PATRIADI, SH.MH 196509201987031003 040053005	Hakim Utama Muda IV/d	S2
15	TOTO RIDARTO, SH.MH 196705161992121001 040064436	Hakim Utama Muda IV/d	S2
16	R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH 195805051988031003	Hakim Madya Utama IV/c	S2
17	R.IIM NUROHIM, SH. 195908131989031005	Hakim Madya Utama IV/c	S1
18	SUDJARWANTO, SH.MH 196005021992121001	Hakim Madya Utama IV/c	S2

20	YOSDI, SH 196104101992121001	Hakim Madya Utama IV/c	S1
21	DEDY HERMAWAN, S.H., M.H. 196105301992121001 040064457	Hakim Madya Utama IV/c	S2
22	MERY TAAT ANGGARASIH,SH.MH 196106131985032002 040048457	Hakim Madya Utama IV/c	S2
23	SUHARNO, SH. MH. 196201121992121001 040064522	Hakim Madya Utama IV/c	S2
24	AGUS WIDODO, S.H., M.Hum. 196208181992121001	Hakim Madya Utama IV/c	S2
25	FLORENSANI SUSANA KENDENAN, SH., MH. 196408191992122001	Hakim Madya Utama IV/c	S2
26	ELFIAN, SH., MH 196512111992121001	Hakim Madya Utama IV/c	S2
27	SUSWANTI, SH.MHum. 196602071992032002 040064078	Hakim Madya Utama IV/c	S2
28	FAUZIAH HANUM HARAHAP, SH.,MH 196608071992122001 040064434	Hakim Madya Utama IV/c	S2
29	H AKHMAD SUHEL, SH 196611121992121001 040064396	Hakim Madya Utama IV/c	S1
30	HARIYADI, S.H.,M.H. 196701181992121001 040064538	Hakim Madya Utama IV/c	S2
31	ARLANDI TRIYOGO, SH. MH 195903071982031005 040039720	Hakim Madya Muda IV/b	S2
32	Dr.FAHMIRON, SH.M.Hum 196706191996031001 040070125	Hakim Madya Muda IV/b	S2
33	ACHMAD FIRDAUS, SH.MH 196303191984031001	Pembina Utama Muda IV/c	S2
34	MUHTAR, SH.MH 196203131983031006 040043155	Pembina Tingkat I IV/b	S2
35	H.M. TAUFIK, SH.MH 196310051993031001 040067160	Pembina IV/a	S2
36	SUTAJI, SH., MH 197009071993031007 040066771	Pembina IV/a	S2
37	SUYATNO, SH.,MH 196210101985031009 040047483	Pembina IV/a	S2
38	SUMARDIYANTA, SH., MH 196903141988031001 040054181	Pembina IV/a	S2

39	TANUDDIN LUMBAN GAOL, SH 196306111983031004 040042499	Penata Tingkat I III/d	S1
40	WIWIEK WIDORINIE, SE., MM 197604252009042003	Penata Tingkat I III/d	S2
41	IRHAM HANIF, SH MH 198904062012121002	Penata III/c	S2
42	Dra. WISMAYANDA NAZIR, SH.,MH 196301071985032001 040048323	Pembina IV/a	S2
43	EDI SUWITNO, SH MH 196302131986031003 040050311	Pembina IV/a	S2
44	FERRYANTO ZAGOTO, SH.,MH 196303061986031009 040050571	Pembina IV/a	S2
45	MOHAMAD HOESNA SH.,MH 196503271989031003	Pembina IV/a	S2
46	IIS ROHMAYATI, SH 196505181986032001 040051672	Pembina IV/a	S1
47	MURATNO, SH., MH 196706111988031003 040054690	Pembina IV/a	S2
48	AGUSTINUS ENDRO CHRISTIYANTO, SH., MH 196808051993031009 040066640	Pembina IV/a	S2
49	ANNY MARTHAULI SILALAHI, S.H., M.H. 196901181992032003 040063890	Pembina IV/a	S2
50	SUBARKAH, SH., MH 197006151991031006 040060907	Pembina IV/a	S2
51	ZULI FARMI, SH. 196105141982032001 040039920	Penata Tingkat I III/d	S1
52	DEWI RESMIATI, SH 196204111994032001 040068510	Penata Tingkat I III/d	S1
53	WARSUTI, SH 196208121983022001 040042186	Penata Tingkat I III/d	S1
54	BERTHA TITIK SETYOWATI MOELYONO, SH, MH 196304041988032004 040054179	Penata Tingkat I III/d	S2
55	WIDI ASTUTI,SH. 196305051987022001 040052371	Penata Tingkat I III/d	S1
56	ERNA SULISTYOWATI, SH. 196404041987032005	Penata Tingkat I III/d	S1
57	HESTI FEBRIANTI, SH 196502061989032002 040054990	Penata Tingkat I III/d	S1

58	YUSTITIN, SH. 196512121989032003 196512121	Penata Tingkat I III/d	S1
59	DEDI POERWANTO, SH 196703041987031001 040053318	Penata Tingkat I III/d	S1
60	SRI TASLIHIYAH,SH. 196806151989032002 040054856	Penata Tingkat I III/d	S1
61	MOHAMAD ANWAR, SH MH 196806161990031003 040058594	Penata Tingkat I III/d	S2
62	FERRY NITA, SH 196904011988032001 040054408	Penata Tingkat I III/d	S1
63	MATIUS BUNTU SITURU,SH. 196905261992031001 040062555	Penata Tingkat I III/d	S1
64	SYAFRINAINI, S.H., M.H. 197004301995032001 040069764	Penata Tingkat I III/d	S2
65	JULIASTUTI SETYANINGSIH, SH., MH 197007291993032001 040066225	Penata Tingkat I III/d	S2
66	ELI YUNANI, SH 197008081999032004 040071372	Penata Tingkat I III/d	S1
67	HARDIANTO WIBOWO, S.E., S.H. 197511182002121001 040076694	Penata Tingkat I III/d	S1
68	APRISNO, SH., MH 197804072002121002 040077314	Penata Tingkat I III/d	S2
69	KOMAR,SH. 196706071989031005 040056161	Penata III/c	S1
70	SITI ROHANI, SH MH 197010161994032002 040068647	Penata III/c	S2
71	ANTHOMI KUSAIRI, SH. MH. 197808022006041006 220004021	Penata III/c	S2
72	DWI IRA MARWANTI, S.H., M.H. 198005272009042005	Penata III/c	S2
73	ARIFKIE,SH.MH. 198009272002121002 040076406	Penata III/c	S2
74	MUHAMMAD YUSUF SHALAHUDDIN, S.T., S.H., M.H. 198306162011011012	Penata III/c	S2
75	SARNI, S.H. 198502172006042001 198502172	Penata III/c	S1
76	HUSNA MACHMUD, SH., MH. 198509142006042001 220003862	Penata III/c	S2

77	MORY SENSY SIREGAR, SH 197605292006041002 220002458	Penata Muda Tingkat I III/b	S1
78	ELI SUHELI, S.H. 196306051986031011 040050663	Penata Tingkat I III/d	S1
79	MUHAMAD FUAD, SH. 196702051996031002 040070205	Penata Tingkat I III/d	S1
80	SUTAN ANDARAN, SH. 198311192009041002	Penata III/c	S1
81	ADRA DJAMHUR, SH 196510251989031006 040055250	Penata Tingkat I III/d	S1
82	NURCAHYANI DWI ROSIATI, S.Sos 197607181999032003 040071481	Penata Tingkat I III/d	S1
83	HUSNAWATI, SE 197603202009122004	Penata III/c	S1
84	MARIA ANE NARTIYASARI, SE 198010272009042002	Penata III/c	S1
85	FEBRILIANA FRITHALESTI, SH 198202152001122001 040075818	Penata III/c	S1
86	RADEN ADDIEN SUHERMAN, SE 198301102009121008	Penata III/c	S1
87	KHAIRIL IHSAN, ST 198307202011011011	Penata III/c	S1
88	OCTA ANDRIANTO, SH 198310272011011007	Penata III/c	S1
89	DINI FEBRIANTY. SH 198402242005022001 220001708	Penata III/c	S1
90	YUSCA INDRAWAN, SH 198512012011011006	Penata III/c	S1
91	MARGONO 196202271988031001 040053831	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA
92	RUDI ENDRAWAN 196912171994031002 040068524	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA
93	SUGENG HARYONO, SH 197001172006041001 220004146	Penata Muda Tingkat I III/b	S1
94	WENDRA FEBRIANTO, SH 198202172006041003 220003333	Penata Muda Tingkat I III/b	S1
95	MARYONO, SH 197710022006041003 220003334	Penata Muda III/a	S1
96	MERAHANI, A.Md. 197807202009042003	Penata Muda III/a	D3
97	ROSANNY NOVIANTY NIKA,A.Md. SH 198509302011012015	Penata Muda III/a	S1

98	ERMAN ARIFIN, SH 198704132006041001 220002425	Penata Muda III/a	S1
99	NURUL MUBIN, SH 198711102006041001 220003336	Penata Muda III/a	S1
100	EMAN SUMANTRI 196606051993031011 040065738	Pengatur Tingkat I II/d	SMA
101	YULHENDRA 198304232005021001 220001713	Pengatur Tingkat I II/d	SMA
102	DEWA GEDE RANDHY PRAMITA 198609082006041001 220003335	Pengatur Tingkat I II/d	SMA
103	ANDI ISMAENI 197706072006042002 220003594	Pengatur II/c	SMP
104	WAHYU BUDI SANTOSO, SH 198610052009121007	Penata Muda III/a	S1
105	RIEN RAYHANAH NOOR,SH. 198008052002122002	Penata Tingkat I III/d	S1
106	NOVA RIZKY, S.E., M.H. 198111012006042004 220003371	Penata III/c	S2
107	ASTRID HASTRIDIAN, SH MH 198208182012122001	Penata III/c	S2
108	TATA MUHTADIN 196303201984111001 040046704	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA
109	IRWAN GAOS 196412301993031007 040066203	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA
110	KORINI 196711221989032002 040056355	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA
111	AMBAR ZUMAROH, SH 198012192012122001	Penata Muda Tingkat I III/b	S1
112	BONATUA BONIFACIUS, SH 198406122011011010	Penata Muda Tingkat I III/b	S1
113	SEPTIAN ARI WIDYANTORO, SH 198509222012121001	Penata Muda Tingkat I III/b	S1
114	JULFITRIAL, SH 196911282014081002	Penata Muda III/a	S1
115	NASRUDDIN, SH 197311292014081002	Penata Muda III/a	S1
116	MOH. BURHAN WIDODO 197609092014081002	Penata Muda III/a	SMA
117	ARIFAH WAHYUNINGSIH, A.Md. 198405172009042013	Penata Muda III/a	D3

118	MUHAMMAD RAUFIK 196612282014081001	Pengatur Muda Tingkat I II/b	SMA
119	SUNARDI 198206072014081001	Pengatur Muda Tingkat I II/b	SMA
120	DADANG 196205052014081001	Pengatur Muda II/a	SMA
121	EPA PADLAH 196802152014081001	Pengatur Muda II/a	SMA
122	DEDE MUSLICH 196201162014081001	Juru I/c	SMP

PROMOSI DAN MUTASI

Mutasi TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT
1.	Yanalia Nurmawati SE MM	Staff	Badan Pengawasan
2.	Erni SH MH	Panitera pengganti	PN Jakarta Timur
3.	Asiadi Sembiring SH MH	Hakim	PN Bekasi

Promosi TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT
1.	Dzulkarnain SH MH	Wakil Ketua	PN Gorontalo
2.	Indirawati SH MH	Wakil Ketua	PN Slawi
3.	Achmad Rosidin SH MH	Hakim Tinggi	PT Pontianak
4.	Riyadi Sunindyo Florentinus SH	Hakim Tinggi	PT Samarinda
5.	Martin Ponto Bidara SH	Hakim Tinggi	PT Manado
6.	Syaripudin SH	Panitera Pengganti	PN Cikarang
7.	Zulmaini Vera Sh MH	Panitera Pengganti	PN Bangkinang
8.	Mukhanan SE MH	Panitera Pengganti	PN Karawang

PENSIUN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bambang Sri Budiono SH	Staff kepaniteraan Hukum
2.	Supandi SH MH	Panitera Pengganti
3.	Darmita	Staff kepaniteraan Perdata
4.	Suhartini SH	Staf Kepaniteraan Hukum
5.	Masril	Staff kepaniteraan perdata
6.	Siti Yulaikah SH	Staff kepaniteraan Perdata

D13.IKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS)

NO	NAMA	DIKLAT
1.	Irham Hanif SH MH	Diklat Pim IV
2.	Wahyu Budi Santoso SH	Diklat pustakawan
3.	Yulhendra	Diklat Bendahara Pengeluaran
4.	Suswanti SH MH	DIklat sertifikasi mediator hakim
5.	Achmad Firdaus SH MH	Diklat Manajemen Peradilan Tingkat Lanjut
6.	Dr Joni SH MH	Diklat Criminal Justice System
7.	Sudjarwanto SH MH	Diklat Sertifikasi Sistem Peradilan Anak
8.	Rien Rayhanah Noor SH	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
9.	Andi Ismaeni	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

REGULASI TAHUN 2019

Surat Keputusan yang Dikeluarkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2019 :

No	NOMOR SK	NAMA	TANDA TANGAN
	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan		
1.	W10.U3/04/kp.04.5/1/2019	SK Perubahan Susunan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti	KPN
2.	W10.U3/05/kp.04.5/1/2019	SK Perubahan Hakim Pengawas Bidang	KPN
3.	W10.U3/06/kp.04.5/1/2019	SK Penunjukan Kordinator penangan bantuan panggilan/pemberitahuan	KPN
4.	W10.U3/08/kp.04.5/1/2019	SK Penunjukan Pengangangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	KPN
5.	W10.U3/09/kp.04.5/1/2019	SK Pengangkatanpejabat penguji dan penandatanganan surat perintah membayar	KPN
6.	W10.U3/010/kp.04.5/1/2019	SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen	KPN
7.	W10.U3/11/kp.04.5/1/2019	SK Penunjukan Staf Pengelola keuangan	KPN
8.	W10.U3/15/kp.04.5/1/2019	SK pengangkatan Bendahara Penerima	KPN
9.	W10.U3/36/kp.04.5/1/2019	SK Perubahan susunan Tim Zona Integritas	KPN
10.	W10.U3/037/kp.04.5/1/2019	SK Perubahan Tim Reformasi Birokrasi	KPN

MATRIK KERANGKA REGULASI

NO	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim Dan Panitera
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	SOP Penyelesaian Perkara	Ketua,Wakil Ketua dan Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatkannya kepastian hukum	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA, PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Kanwil DITJEN Perbendaharaan DKI Jakarta memberikan Piagam Penghargaan Kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN sebagai Pengelola Anggran Berkinerja Terbaik Tahun 2019 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta.

MEMBERIKAN
PIAGAM PENGHARGAAN
KEPADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
MAHKAMAH AGUNG
SEBAGAI
PENGELOLA ANGGARAN BERKINERJA TERBAIK
TAHUN 2019
LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA, 28 NOVEMBER 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
LUDIRO

Sub Bagian Tata Usaha & Keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan belanja untuk periode **Tahun 2019**. Berdasarkan laporan ini, realisasi Belanja Negara untuk DIPA 01 adalah sebesar ***Rp20.475.207.731,-*** atau **99,10%.** DIPA 01 Tahun anggaran 2019 ini sudah berubah setelah terdapat revisi menjadi **Rp20.661.247.000,-**. Realisasi Belanja Negara untuk DIPA 03 adalah sebesar ***Rp827.725.100,-*** atau **96,50%** dari yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah **Rp857.730.000,-**. Sedangkan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan (PNBP) TahuN 2019 untuk DIPA 01 sebesar

Rp163.306.823, dan DIPA 03 sebesar **Rp264.599.000,-**. Adapun rincian mengenai realisasi anggaran untuk belanja negara adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Anggaran dan Realisasi DIPA-005.01.2.400214/2019

No.	Kegiatan	Output	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%-tase	Sisa Anggaran
01	1066	994	Belanja Pegawai	17,971,358,000	17,995,131,493	100.13%	(23,773,493)
02	1066	970	Belanja Barang Operasional	7,920,000	7,920,000	100.00%	-
03	1066	994	Belanja Barang Operasional	2,544,469,000	2,334,766,238	91.76%	209,702,762
04	1071	951	Belanja Modal	137,500,000	137,390,000	99.92%	110,000
J U M L A H				**20,661,247,000**	**20,475,207,731**	**99.10%**	**186,039,269**

Tabel 2: Anggaran dan Realisasi DIPA-005.03.2.400215/2019

No.	Kegiatan	Output	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%-tase	Sisa Anggaran
01	1049	003	Belanja Barang	72,000,000	60,000,000	83.33%	12,000,000
02	1049	005	Belanja Barang	785,730,000	767,725,100	97.71%	18,004,900
J U M L A H				**857,730,000**	**827,725,100**	**96.50%**	**30,004,900**

A. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Kode Satuan Kerjanya yaitu 400214 dan 400215 pada tahun 2019 ini memiliki 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Nomor DIPA-005.01.2.400214/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan DIPA Nomor DIPA-005.03.2.400215/2019 tanggal 05 Desember 2018.

Adapun untuk DIPA Nomor DIPA-005.01.2.400214/2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp20.661.247.000,- sedangkan DIPA Nomor DIPA-005.03.2.400215/2019 tanggal 05 Desember 2018 diperuntukkan bagi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp857.730.000,- sehingga total anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp21.518.977.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Barang Non Operasional (uraian terlampir).

1. DIPA-005.01.2.400214/2019

a. Belanja Pegawai

Untuk Belanja Pegawai yang telah terealisasi pada Tahun 2019 sebagai berikut:

Indikator Kegiatan : Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

Untuk anggaran Belanja Pegawai sebesar **Rp17.971.358.000,-** telah dibayarkan untuk gaji para Hakim dan Pegawai sampai dengan akhir Tahun 2019 sejumlah **Rp17.995.131.493,-** telah terserap **58,31%** dan sisa anggaran menjadi **Rp8.193.878.566**,-.

Tabel 2 : Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

NO	KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN	URAIAN JENIS BELANJA	JMLH ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA PEGAWAI				
1	1066.01.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	**6,599,988,000**	6,628,041,500	(28,053,500)	100.43%
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	**90,000**	90,813	(813)	100.90%
	511121	Belanja Tunjangan. Suami/Istri	**517,532,000**	520,546,180	(3,014,180)	100.58%
	511122	Belanja Tunjangan. Anak PNS	**137,606,000**	138,576,694	(970,694)	100.71%
	511123	Belanja Tunjangan. Struktural P	**64,750,000**	64,750,000	-	100.00%
	511124	Belanja Tunjangan. Fungsional	**8,017,000,000**	8,064,570,000	(47,570,000)	100.59%
	511125	Belanja Tunjangan. PPH PNS	**1,255,926,000**	1,268,596,046	(12,670,046)	101.01%
	511126	Belanja Tunjangan. Beras PNS	**292,577,000**	293,518,260	(941,260)	100.32%
	511129	Belanja Uang Makan PNS	**1,026,914,000**	958,182,000	68,732,000	93.31%
	511151	Belanja Tunjangan. Umum PNS	**58,975,000**	58,260,000	715,000	98.79%
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	**17,971,358,000**	**17,995,131,493**	**(23,773,493)**	**100.13%**

b. Belanja Barang

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Untuk belanja barang dari jumlah anggaran yang tersedia yaitu sebesar **Rp2.029.789.000**,- pada Tahun 2019 ini terjadi revisi anggaran sehingga jumlah pagu anggaran untuk belanja barang menjadi **Rp2.106.789.000,-,** sementara untuk realisasi anggaran sampai Tahun 2019 sebesar **Rp1.301.038.679,-** sehingga sisa anggarannya menjadi **Rp803.110.321,-**. Adapun rincian dari anggaran Belanja Barang Operasional ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Realisasi Belanja Barang Tahun 2019

NO	Kegiatan	Output	Kode Mata Anggaran	URAIAN JENIS BELANJA	JMLH ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	(%)
1			2	3	4	5	6	7
2				**BELANJA BARANG**				
	1066	970	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	**7,920,000**	7,920,000	-	100.00%
				JUMLAH	**7,920,000**	7,920,000	-	100.00%
	1066	994	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	**561,419,000**	531,706,118	29,712,882	94.71%
			521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	**10,254,000**	10,253,300	700	99.99%
			521115	Belanja Honor Operasional Satker	**65,040,000**	59,620,000	5,420,000	91.67%
			521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	**139,139,000**	139,009,000	130,000	99.91%
			521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	**288,712,000**	288,711,500	500	100.00%
			5221111	Beban Langganan Listrik	**555,900,000**	481,430,043	74,469,957	86.60%
			522112	Beban Langganan Telepon	**2,000,000**	1,468,427	531,573	73.42%
			522141	Beban Belanja Sewa	**310,000,000**	167,000,000	143,000,000	53.87%
			523111	Beban Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**331,276,000**	331,241,750	34,250	99.99%
			523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**270,449,000**	264,653,100	5,795,900	97.86%
			524111	Belanja Perjalanan Biasa	**5,220,000**	5,160,000	60,000	98.85%
			524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	**5,060,000**	5,060,000	-	100.00%
				JUMLAH	**2,544,469,000**	**2,285,313,238**	**259,155,762**	**89.81%**

c. Belanja Modal

Untuk belanja Modal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 ini memiliki anggaran Belanja Modal sebesar Rp137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

NO	KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN	URAIAN JENIS BELANJA	JMLH ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		BELANJA MODAL				
1	1071.996.53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**137,500,000**	137,390,000	110,000	99.92%
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	**137,500,000**	**137,390,000**	**110,000**	**99.92%**

2. DIPA-005.03.2.400215/2019

a. Belanja Barang

Untuk belanja barang Non Operasional dari anggaran yang telah disediakan dari jumlah anggaran **Rp857.730.000,-**. Sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 ini telah terjadi realisasi anggaran sebesar **Rp827.725.100,-** atau 96,50%. Adapun untuk rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4 : Realiasasi Belanja Barang Non Operasional bulan Juli Tahun 2019

NO	KODE MATA ANGGARAN KEGIATAN	URAIAN JENIS BELANJA	JMLH ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1		**BELANJA BRG NON OPERASIONAL**				
	1049.003.522131	Beban Jasa Konsultan	**72,000,000**	60,000,000	12,000,000	83.33%
	1049.005.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	**80,000**	-	80,000	0.00%
	521211	Belanja Bahan	**253,150,000**	249,341,300	3,808,700	98.50%
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	**465,620,000**	465,183,800	436,200	99.91%
	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	**66,880,000**	53,200,000	13,680,000	79.55%
		JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	**857,730,000**	**827,725,100**	**30,004,900**	**96.50%**

B. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima realisasi PNBP berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2019 yang telah dipungut dari berbagai jenis pendapatan dan penerimaan (MAP) dan disetorkan kepada Kas Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019

Dipa No : DIPA-005.01.2.400214/2019 tanggal 05 Desember 2018

No	Uraian Jenis Pendapatan / Mata Anggaran Penerimaan (MAP)		Jumlah Penerimaan Tahun Ini
I	**Pendapatan Penjualan**		
	425141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	163,119,700
	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-
	Jumlah I		**163,119,700**
II	**Pendapatan Lain-lain**		
	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-
	423991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	-
	Jumlah II		**-**
III	**Pendapatan Lain-lain II**		
	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	187,123
	425991	Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	-
	Jumlah III		**187,123**
	Jumlah I s.d III		**163,306,823**

Dipa No : DIPA-005.03.2.400215/2019 tanggal 05 Desember 2018

No	Uraian Jenis Pendapatan / Mata Anggaran Penerimaan (MAP)		Jumlah Penerimaan s.d bulan ini
I	**Pendapatan Penjualan**		
	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0
	Jumlah I		**0**
II	**Pendapatan Jasa**		
	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-
	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	0
	Jumlah II		**0**
III	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dari Hasil Tipikor**		
	425231	Pengesahan surat dibawah tangan	1,775,000
	425232	Uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	8,352,000
	425233	Ongkos perkara	105,370,000
	425239	Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	149,102,000
	Jumlah III		**264,599,000**
IV	**Pendapatan Lain-lain**		
	423911	Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	
	Jumlah IV		
	Jumlah I s.d III		**264,599,000**

Tabel 6 : Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)sampai dengan Tahun 2019

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Revisi
1	2	3
1	Pendapatan Penjualan	163,119,700
2	Pendapatan Jasa	-
3	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan	264,599,000
4	Pendapatan Lain-lain	187,123
Jumlah		**427,905,823**

Persuratan Bagian Tata Usaha

NO.	JENIS SURAT	PROSES		KET
		MASUK KE PIMPINAN	TURUN DARI PIMPINAN	
1.	Surat Masuk	11.369	11.369	
2.	Delegasi Masuk	10.819	10.819	
3.	Surat Keluar Kepaniteraan	3.158	3.158	
4.	Surat Keluar Kesekretariatan	800	800	
5.	Surat Keluar Delegasi	13.222	13.222	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Sedan Altis	2015	√			Hibah MA
2.	Sedan Altis	2015	√			Hibah MA
3.	Sedan Vios	2008	√			Hibah MA
4.	Kijang Super KF 52	2002	√			
5.	Toyota Kijang STD KF 80	2004	√			
6.	Kijang Innova	2010	√			
II	**Jenis Kendaraan**					

	Roda 2					
1.	GL Pro	2004			√	
2.	GL 160 D	2009	√			
3.	GL 160 D	2009	√			
4.	GL 160 D	2009	√			
5.	GL 160 D	2009	√			
6.	Supra Pit NF 125 SF	2007	√			
7.	Kharisma NF 125 D	2004	√			
8.	Kharisma NF 125 D	2004	√			
9.	Supra Pit NF 125 SF	2008	√			
10	Vario NC 110 D	2009	√			

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	8	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	8	
7.	Ruang Kepaniteraan	3	
8.	Ruang Kabag Umum	1	
9.	Ruang Kasubag TU dan Keuangan	1	
10.	Ruang Kasubag Kepegawaian	1	
11.	Ruang Kasubag IT	1	

12.	Ruang Jurusita	1	
13.	Ruang Panitera Pengganti	1	
14.	Ruang Perpustakaan	1	
15.	Ruang Mediasi	2	
16.	Ruang Rapat	1	
17.	Ruang Dharmayuktikarini	1	
18.	Ruang Arsip	6	
19.	Ruang Jaksa	1	
20.	Ruang Pos Bakum	1	
21.	Ruang Laktasi	1	
22.	Ruang Gudang	3	
23.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
24.	Komputer / P.C Unit	31	
25.	Laptop	53	
26.	Infokus	1	
27.	PABX	2	
28.	Mesin Tik	20	
29.	Mesin Fotokopy	1	
30.	Ac	16	
31.	Faximile	1	
32.	Genset	-	
33.	Lemari Besi	23	
34.	Lemari Kayu	3	
35.	Filing Cabinet Besi	29	

36.	Brandkas	2	
37.	Roll Opec	10	
38.	Tabung Pemadam Api	18	
39.	CCTV	16	
40.	Papan VIsual Nama	63	
41.	White Board	21	
42.	Alat Detektor X-Ray	1	
43.	Peta	1	
44.	Alat Penghancur Kertas	1	
45.	Meja Kerja Kayu	268	
46.	Kursi Besi	199	
47.	Kursi Kayu	175	
48.	Sice	8	
49.	Bangku Panjang Kayu	54	
50.	Meja Rapat	1	
51.	Meja Komputer	4	
52.	Meja repsesionis	3	
53.	Sketsel	23	
54.	Jam	26	
55.	A.C	11	
56.	Kipas Angin	29	
57.	Exhause Fan	4	
58.	Televisi	1	
59.	Sound System	2	

60.	Microphone	3	
61.	Lambang Garuda Pancasila	12	
62.	Gambar Presiden / Wakil Presiden	6	
63.	Palu Sidang	7	
64.	Handy Cam	1	
65.	Mic Werles (TOA)	2	
66.	Camera Digital	1	
67.	Handy Talky (HT)	6	
68.	Kursi Dorong	20	
69.	Printer	35	
70.	Server	2	Hibah dari MA
71.	Router	10	
72	Laptop	11	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya aplikasi e-court. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 3 unggulan yaitu, *e-filling* (pengisian data – data pendaftaran perkara), *e-payment* (pembayaran panjar perkara), *e-summons* (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili). e-court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik. Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan telah menerapkan penggunaan Aplikasi E court dan Jumlah Perkara yang masuk melalui Aplikasi E court sebanyak:

Perdata Gugatan		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	235
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	8
Perdata Bantahan		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	1
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	-
Perdata Gugatan Sederhana		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	3
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	1
Perdata Permohonan		
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	223
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	1

Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Beracara dari negeri kangguru (Australia), e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital.

Meja Pelayanan E-Court Pada Ruang PTSP PN Jakarta Selatan

Pengadilan Tinggi DKI Juga telah memberikan sosialisasi penerapan Aplikasi E-Court Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 November 2019 beserta Tata Cara Pendaftaran Perkara melalui Aplikasi E-court.

2. <u>IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Versi</u> <u>3.3.0-1</u>

Pencapaian Kinerja Pada SIPP Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencapai Kinerja **78,04%** sampai akhir desember 2019, sedangkan pada Evaluasi SIPP Badan Peradilan Umum mencapai **800.42** Poin sampai akhir Desember 2019,sedangkan Pencapaian Kinerja SIPP Lokal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Aplikasi Monitoring SIPP mencapai 78,15

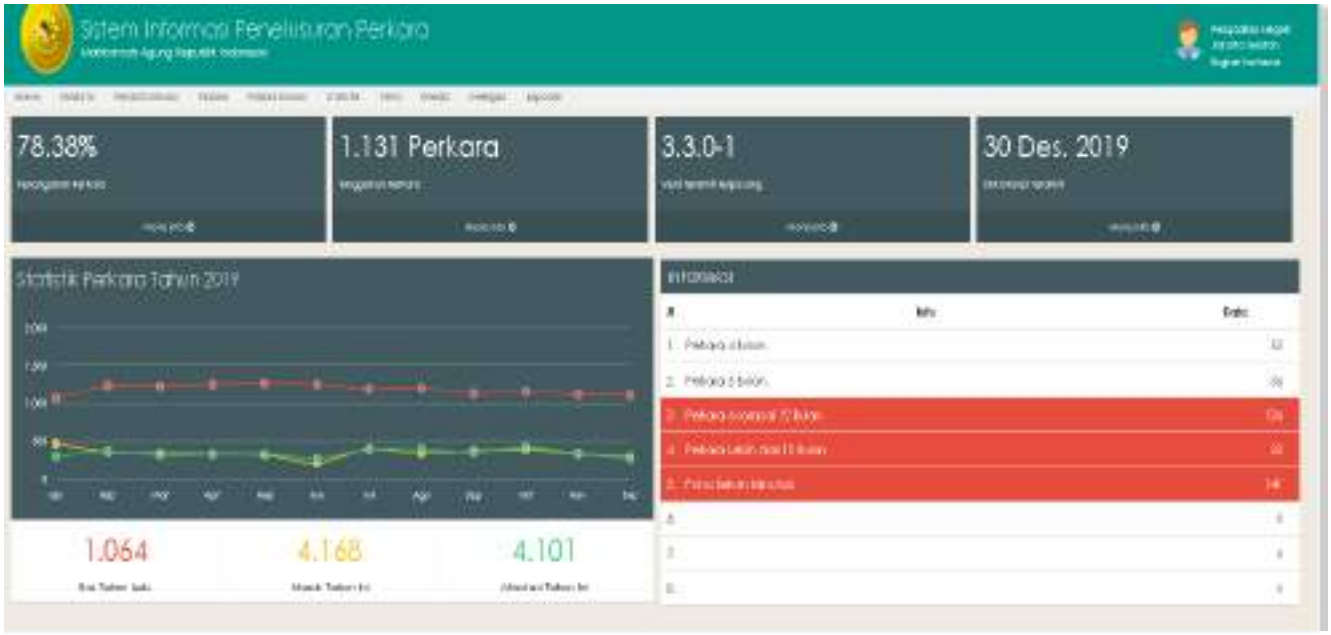
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
78.38%
1.131 Perkara
3.3.0-1
30 Des. 2019
Statistik Perkara Tahun 2019
Informasi
1.064
4.168
4.101

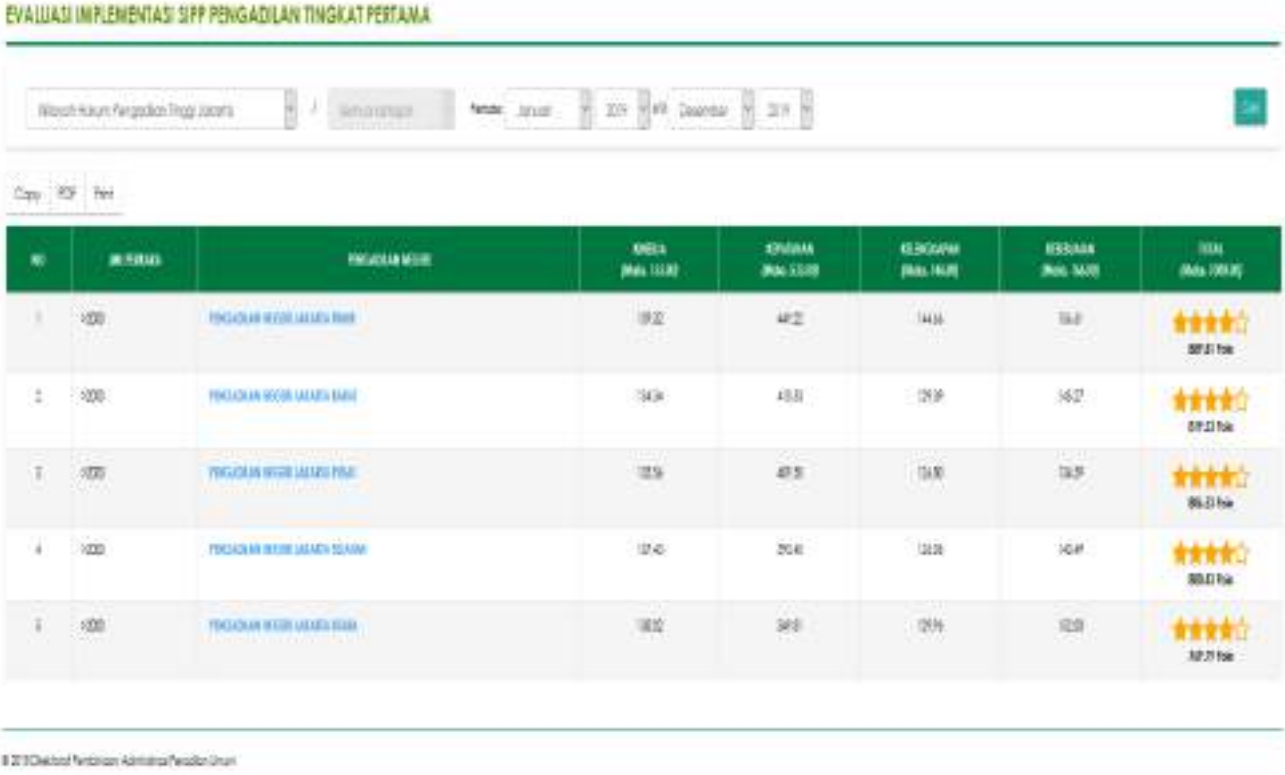
EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

TOPOLOGI JARINGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

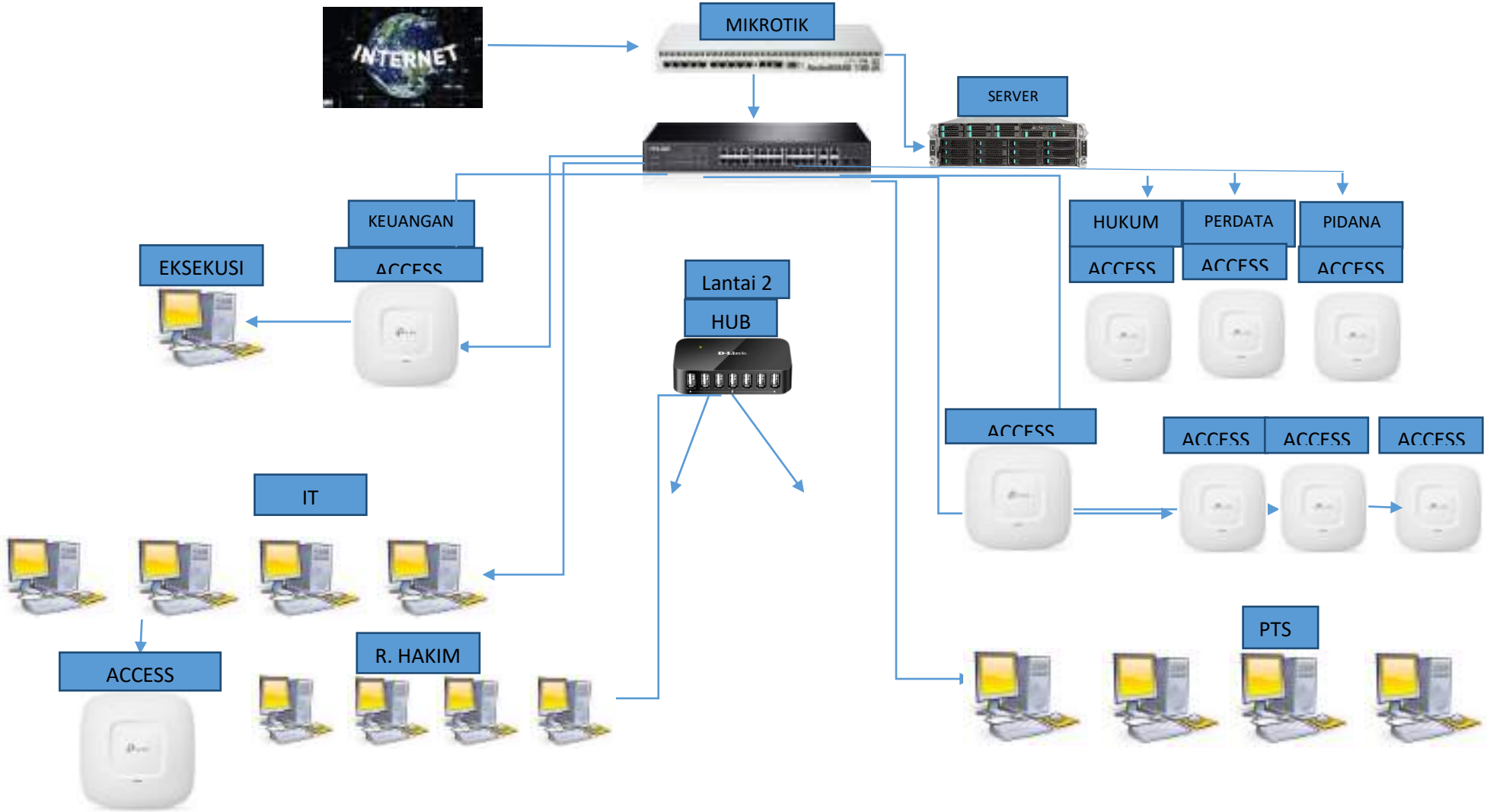

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Tugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

- Adil dan tidak diskriminatif;
- Cermat;
- Santun dan ramah;
- Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- Profesional;
- Tidak mempersulit;
- Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- Sesuai dengan kepantasan; dan
- Tidak menyimpang dari prosedur.

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar **88,87** yang berada pada kategori **SANGAT BAIK** (pada interval 81,26 s/d 100,00) .

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,35 berada pada interval skor 3,26 – 4,00 kategori SANGAT BAIK . Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori SANGAT BAIK.

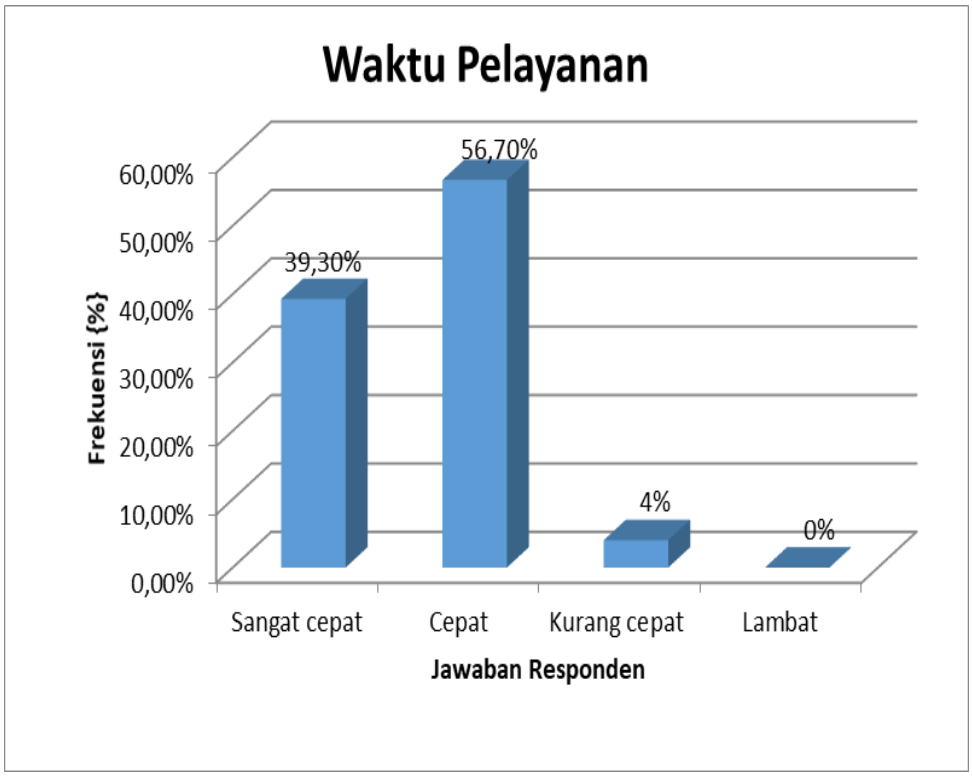

Melalu Website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sarana untuk Pelayanan Publik untuk Masyarakat. pn-jakartaselatan.go.id

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut

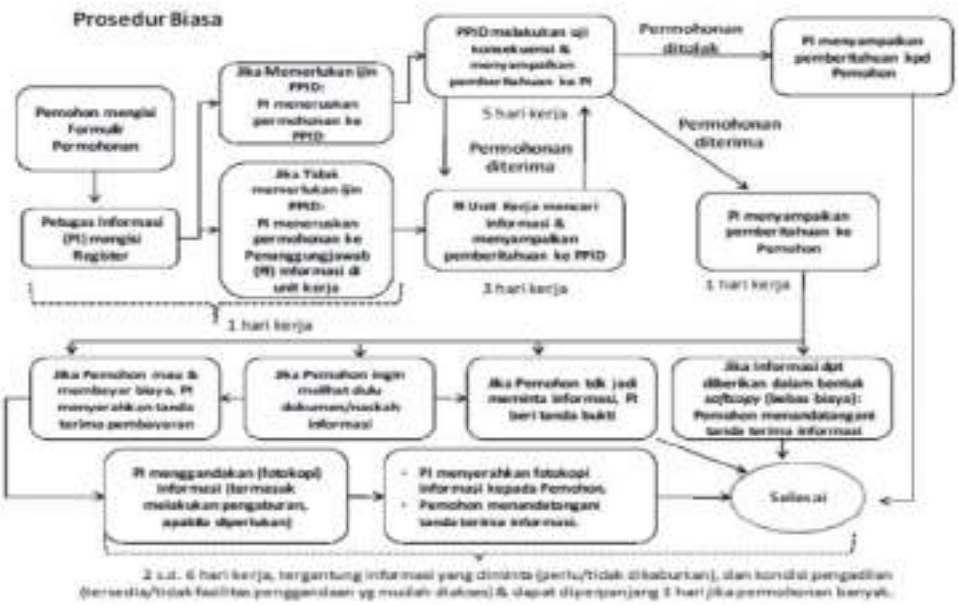

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.Hal tersebut menjadi salah satu dasar tercapainya Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN. Dan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu diberikan Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Penghargaan atas Kinerja dan Pelayanan yang Baik dan memenuhi pelayanan standar peradilan yang bermutu.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pada tanggal 7 Mei 2018, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) & e-Panjar PN Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Ketua Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta.

foto peresmian PTSP

PTSP PN Jakarta Selatan

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Inovasi Yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

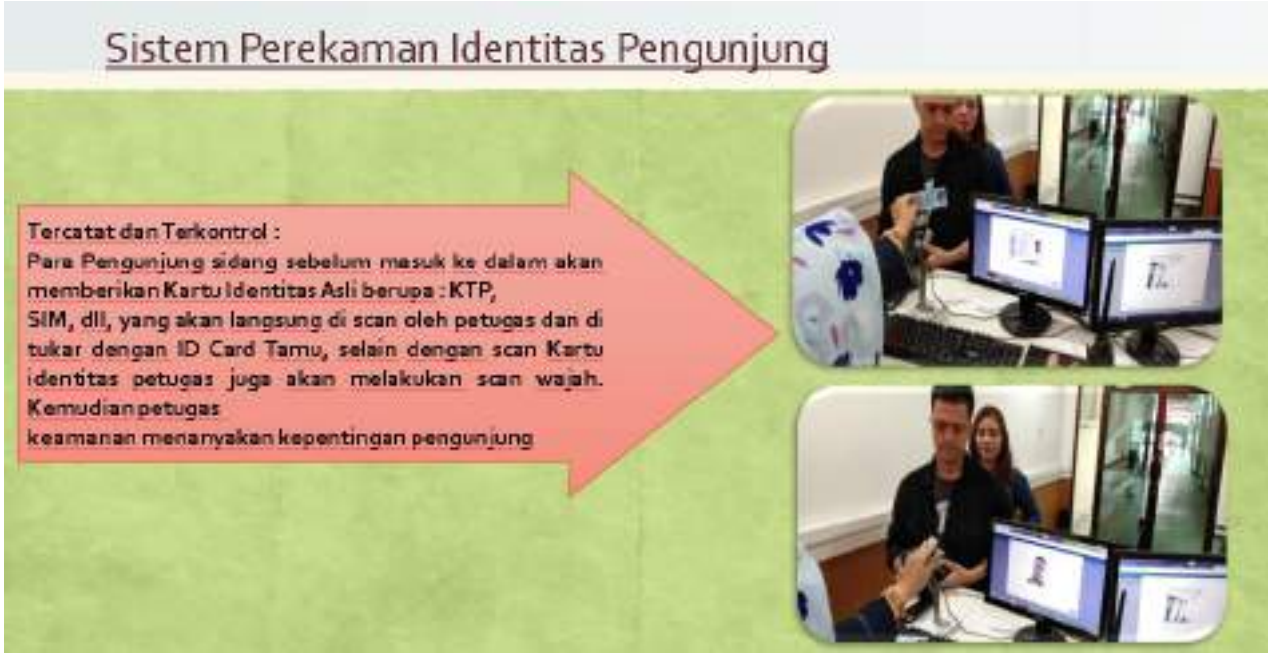

SPK DELEGASI (SISTEM PENDUKUNG KERJA)

PANGGILAN ANTRIAN SIDANG

Aplikasi E TILANG

ASISTEN DIGITAL PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MELALUI APLIKASI WHATSHAP DENGAN NOMOR KONTAK 081317172906

Audio Peringatan Anti Gratifikasi

BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka melaksanakan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan khususnya pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berada pada Ketua dan Wakil Ketua, dalam pengelompokannya dilakukan 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dan juga Pengawasan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berdasarkan pada Perma 7,8 dan 9 tahun 2016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan Melekat disini adalah pengontrolan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh staf atau bawahan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, manakala terhadap hambatan dalam pelaksanaan tugas senantiasa dilakukan penelusuran penyebab terjadi hambatan tersebut. Apabila dikarenakan oleh faktor kurangnya minat personil untuk mengerjakan tugas tersebut, maka dilakukan mutasi staf antar ruangan, sementara bila kurang pemahaman personil dilakukan bimbingan oleh petugas lain yang lebih memahami tugas dimaksud. Pengawasan fungsional disini dilakukan oleh beberapa hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : W10.U3/115/KP.04.6/11/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dilingkungan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan yang berdasarkan pada Perma 7,8 dan 9 tahun 2016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS
Nomor : W10.U3/ [illegible] / KP.04.6/11/2019

Tentang

PERUBAHAN SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KELAS 1A KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/7/KP.04.6/7/2019 tanggal 1 Juli 2019 Tentang Perubahan Susunan Hakim Pengawas Bidang Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang : a. Bahwa berhubung terjadinya Mutasi Para Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga mengakibatkan kekosongan Hakim Pengawas Bidang, Maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang maka perlu diadakan Perubahan Susunan Hakim Pengawas Bidang.

b. Bahwa Susunan Hakim Pengawas Bidang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/7/KP.04.6/7/2019 tanggal 1 Juli 2019 sudah tidak sesuai lagi untuk itu ketentuan diubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. Bahwa Susunan Hakim Pengawas Bidang yang baru adalah sebagaimana yang tercantut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

d. Bahwa para Hakim yang dianggap dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/012/SK/III/1998 jo Nomor: KMA/019/SK/VI/1991;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/005/SK/I/1992;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/II/1994;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/008/SK/II/1994;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung TI Nomor : KMA/089/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/XI/2006 tentang tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Mencabut : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/7/KP.04.6/7/2019 tanggal 1 Juli 2019 Tentang Susunan Hakim Pengawas Bidang Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan tidak berlaku.

Menetapkan :

PERTAMA : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

KEDUA : 1. Menunjuk DR. JONI, SH, MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Koordinator Pengawas Bidang;

2. Para Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Pengawasan Bidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan bidangnya masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Koordinator Pengawas setiap bulan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan ini dan untuk dapat dipergunakan serta dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab ;

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 13 November 2019

Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus

Drs. Arifin, SH, M.Hum

NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG
			A. KEPANITERAAN PIDANA
1	ELFIAN, SH., MH	HAKIM	- Tertib Administrasi Perkara Pidana (seluruh register perkara Pidana) Tilang dan Tipiring - Tertib Administrasi Khususnya Penyerahan/ Penyemposian Salinan Putusan serta Minutasi berkas
2	LENNY WATI MULASIMADHI, SH.MH HARYADI, SH, MH	HAKIM	- Tertib Administrasi Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali serta Grasi - Tertib Administrasi Perkara Pidana Anak, Korban Anak, Penahanan, Register, Praperadilan
			B. KEPANITERAAN PERDATA
3	DJOKO INDIARTO, SH, MH YOSDI, SH	HAKIM	- Tertib Administrasi Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan) dan Gugatan Online
	ZULKIFLI,SH.,MH H. AKHMAD SUHEL, SH		- Tertib Administrasi Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK - Tertib Administrasi Minutasi Putusan dan Penyerahan Salinan Putusan
4	AGUS WIDODO,SH.,M.Hum	HAKIM	- Tertib Administrasi Eksekusi Putusan
5	DEDY HERMAWAN, SH, MH	HAKIM	- Tertib Administrasi Keuangan Perkara Pihak ke III
6	SUDJARWANTO, SH, MH	HAKIM	- Tertib Administrasi Mediasi
			C. KEPANITERAAN HUKUM
7	AKHMAD JAINI, SH.MH.	HAKIM	- Tertib Administrasi pendaftaran surat kuasa, pencatatan badan hukum, legalisasi waris, dll. yang menjadi wewenang Kepaniteraan Hukum
8	KRISNUGROHO S. P, SH, MH	HAKIM	- Tertib Administrasi Arsip Perkara Perdata Dan Pidana

			D. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
9	FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH.MH	HAKIM	- Tersib Administrasi Pengelolaan Keuangan
10	TOTO RIGANTO, SH, MH	HAKIM	
11	ARLANDI TRIYOGO, SH, MH	HAKIM	- Tersib administrasi kendaraan roda dua/ mobil/ Inventaris Barang (SIMAK BMN) dan Belanja Pegawai lainnya.
12	FLORENSIAH SUSANA KENDEANA, SH, MH	HAKIM	- Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kantor
13	NAUVIE EFFRIANDI, SH		
			E. SUB BAGIAN KEPERSONALAN
14	HI. MARTINI PRIBADI,SH,MH	HAKIM	- Tersib Administrasi Kepegawaian
	FAUZIAH HANUM HARAHAP, SH, MH		
			F. SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
15	RUSMONO,SH,MH	HAKIM	- Tersib Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
16	ACHMAD GUNTUR,SH	HAKIM	- Tersib Pengelolaan SIPP
			G. PORBAKUM
17	SUSWANTI,SH,MHum	HAKIM	- Pengadaan Prodeskum
			H. PANGGILAN (INTERN DAN DELEGASI)
18	HERRY TAAT ANGGARASNI, SH,MH	HAKIM	- Tersib administrasi panggilan (intern dan delegasi)
	SAHARNO,SH,,MH		
			I. HUMAS (HUBUNGAN MASYARAKAT)
19	ACHMAD GUNTUR, SH	HAKIM	- Pelayanan yang berhubungan dengan penerangan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
			- Hakim

Disamping Hakim Pengawas Bidang dan Satuan Tugas Penanganan Register tersebut di atas juga telah ditujuk Hakim untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi sekitar kegiatan Pengadilan Negeri jakarta Selatan yaitu Hakim Hubungan Masyarakat dengan tugas memberikan informasi dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan W10.U3/111/KP.04.6/10/2018 tentang Penunjukan Hakim Sebagai Humas Dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menunjuk **Achmad Guntur,SH.**

B. EVALUASI

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:

a. Setiap bulan telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain: Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Laporan Minutasi Perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP.

b. Secara rutin dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagain dari Mahkamah Agung melakukan serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan yang optimal bagi para pencari keadilan. Dengan adanya sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang merupakan pihak yang terlibat di dalamnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan saat ini akhir tahun 2019 masih menggunakan gedung kantor sendiri yang di awal tahun 2018 sudah melakukan renovasi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi masyakarat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang profesional, terwujudnya peradilan yang Luhur dan Bermartabat Menuju peradilan umum yang Agung.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan sumber daya aparat yang mandiri dan profesional.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan rasa keadialan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam peningkatakan penyusunan dan implemetasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat mengharapkan peningkatan sarana prasaranan serta keterampilan sumber daya manusia kepada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perlu penambahan pegawai baik teknis maupun non teknis.
3. Perlunya pelatihan di bidang Teknologi Informasi untuk lebih memajukan lagi sarana dan prasarana yang berbasis Teknologi Informasi

LAMPIRAN

LAPORAN TAHUNAN 2019

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

DOCUMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2019

Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

RAPAT EVALUASI KINERJA DAN PEMBINAAN

KEBERSAMAAN PADA SENAM JUMAT PAGI

UPACARA HARI LAHIR PANCASILA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KELAS 1A KHUSUS
MELAYANI PEMBUATAN
SURAT KETERANGAN
SECARA ELEKTRONIK
Ajukan Permohonan Anda Melalui Situs
eraterang
https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id
Menuju "Era Baru Peradilan Modern Berbasis
Teknologi Informasi"

PELAYANAN E- COURT DAN LAPOR SIDANG
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KELAS 1A KHUSUS

SOSIALISASI e-LITIGATION
(e-COURT)
Perma No.1 Tahun 2019

PERADI
SOSIALISASI e-LITIGATION
(e-COURT)
Perma No.1 Tahun 2019
Jakarta, 24 Januari 2020
PN JAKARTA SELATAN KELAS 1 A KHUSUS
DPC PERADI RBA JAKARTA SELATAN

PRESENTASI
BUKTI ELEKTRONIK